
PEMBERDAYAAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) OLEH DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMEDANG

Meli Nurlaelasari
Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Jul 2, 2025

Revised Nov 10, 2025

Accepted Nov 30, 2025

Keywords:

Human Resources

Empowerment

Tourism Awareness Group

ABSTRACT

This study aims to determine how the empowerment of tourism awareness groups by the Sumedang Regency Tourism, Culture, Youth and Sports Office. The research method used in this research is qualitative research method. The technique of determining informants is by purposive sampling technique. With informants, namely the Head of the Tourism Division, Staff of the Tourism and Creative Economy Adyatama Section of Young Experts, Chairperson of the Nyalindung Village Tourism Awareness Group, Chairperson of the Gunturmekar Tourism Awareness Group, Chairperson of the Citengah Village Tourism Awareness Group, Chairperson of the Rancamulya Village Tourism Awareness group. The data collection techniques used were literature studies and field studies consisting of observation, interviews, documentation, and triangulation. The data validity techniques used are credibility, transferability, dependability, and confirmability tests. Data analysis techniques in this study are Data collection, Data Reduction, Data Display and Verification. Based on the results of the study, it is concluded that the Empowerment of Tourism Awareness Groups by the Sumedang Regency Tourism, Culture, Youth and Sports Office has not been running optimally because it has not been comprehensive to tourism awareness groups, especially in policy-making participation and has not been carried out regularly. There are obstacles in empowering tourism awareness groups, namely a work environment that is not fully supportive, low community participation, limited funding and human resources, unclear information, and low skills and understanding of members. Efforts to overcome these obstacles are regional structuring, training, monitoring, coaching, imitation studies, cross-sector cooperation, provision of empowerment facilities.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Meli Nurlaelasari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jln. Angkrek Situ No 19 Kelurahan Situ - Sumedang

Email: melinurlaelasari2905@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pariwisata merupakan salah satu program pembangunan prioritas oleh pemerintah yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional yang tujuannya untuk mengembangkan wilayah strategis yang sudah ada dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial.

Pariwisata merupakan sektor pembangun ekonomi yang saat ini sedang gencar dibangun dan dikembangkan di setiap negara. Hal ini dikarenakan banyaknya kontribusi pariwisata terhadap pendapatan dalam negeri, seperti penyumbang devisa negara dan penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian yang cukup besar. Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan perekonomian untuk masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi di Indonesia yang memiliki banyak potensi wilayah yang memiliki daya tarik pariwisata.

Banyak daerah di Indonesia dapat dikatakan cukup sukses dalam mengembangkan pariwisata di masing-masing daerah nya sendiri, salahsatunya di daerah Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa barat mempunyai potensi alam, budaya, dan wisata yang beragam, sehingga mendorong untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata khas Jawa Barat sebagai identitas pariwisata daerah tersebut. Salah satu daerah Jawa Barat yang memiliki potensi Pariwisata adalah Kabupaten Sumedang.

Kabupaten Sumedang memiliki 4 Desa Wisata yang sudah di deklarasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang. Tidak hanya itu Kabupaten Sumedang sendiri memiliki banyak objek daya Tarik wisata yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, dari tahun ke tahun jumlah Objek Daya Tarik Wisata meningkat, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1. Objek Daya Tarik Wisata

Jumlah Objek Daya Tarik Wisata	
Tahun	Jumlah
2022	75
2023	77
2024	83

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga

Dilihat dari tabel di atas dari tahun 2022, 2023, 2024 Objek Daya Tarik Wisata terus meningkat, untuk mengembangkan dan mempertahankan objek daya tarik wisata secara berkelanjutan perlu juga adanya pengembangan terhadap masyarakat sekitar. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengoptimalkan pengembangan wisata desa maka di bentuklah Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), pembentukan Kelompok Sadar Wisata ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam, memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi daya tarik wisata yang ada di masing-masing daerah.

Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kabupaten Sumedang mengacu pada Peraturan Bupati Sumedang nomor 198 tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata. Pembentukan kelompok sadar wisata dimaksudkan untuk mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar daya tarik wisata, sehingga kualitas perkembangan kepariwisataan daerah meningkat. Peran Kelompok Sadar Wisata tersebut sangat penting, maka dari itu Kelompok Sadar Wisata perlu di berdayakan, karena pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata merupakan kunci untuk mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 198 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata meliputi: a. kelembagaan; b. pendampingan; c. fasilitasi TDUP; d. mutu produk wisata pedesaan; e. peningkatan kemampuan tenaga kerja pariwisata; f. teknis pemasaran/promosi; g. sosialisasi terhadap peraturan perundangan; dan h. pemberian penghargaan bagi pengelolaan Daya tarik wisata yang berprestasi.

Dari observasi awal, peneliti menemukan beberapa indikasi yang mengarah pada pentingnya pemberdayaan pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam mengembangkan Desa Wisata di Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Sumedang. Adapun indikasi-indikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Dalam dimensi daya sosial menurut teori Akadun (2005). Pemberdayaan kelompok sadar wisata masih menghadapi kendala, terutama dalam keterbatasan sumber keuangan. Salah satu staf bidang pariwisata menyampaikan bahwa jadwal pemberdayaan yang idealnya dilakukan setiap 3 kali dalam satu tahun belum berjalan secara konsisten, dengan realisasi hanya 1 hingga 2 kali dalam setahun dan tidak ada dana khusus yang dialokasikan untuk pokdarwis, hal ini dapat dilihat dari laporan tahunan bidang pariwisata.

Akibat keterbatasan dukungan anggaran dari pemerintah, banyak kelompok sadar wisata yang harus berinisiatif sendiri untuk mengadakan pertemuan di desa mereka dengan memanfaatkan dana APBDesa. Hal ini dapat dilihat dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 halaman 35 dan Renstra 2024-2026 Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang.

2. Dalam dimensi daya politik menurut teori Akadun (2005). Partisipasi kelompok sadar wisata dalam pembuatan kebijakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang masih tergolong minim. Salah satu staf bidang pariwisata mengungkapkan bahwa hanya beberapa perwakilan kelompok sadar wisata yang dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari daftar hadir yang menunjukkan keterbatasan jumlah hadir dari kelompok sadar wisata, sehingga aspirasi dan kebutuhan mereka belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 198 tahun 2022 Tentang Kelompok Sadar Wisata.
3. Dalam dimensi daya psikologi menurut teori Akadun (2005). Kurangnya pemberian penghargaan dan pemenuhan kebutuhan material kepada kelompok sadar wisata yang berprestasi dapat berdampak pada menurunnya motivasi anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi ini tercermin dari banyaknya kelompok sadar wisata yang tidak aktif. Salah satu staf bidang pariwisata menyampaikan bahwa bentuk apresiasi yang diberikan kepada kelompok sadar wisata berprestasi sejauh ini hanya berupa prioritas dalam mengikuti pelatihan-pelatihan, tanpa adanya penghargaan yang lebih konkret. Dapat dilihat dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021- 2025

2. METHOD

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif sering disebut *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) (Sugiyono, 2019). Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2019:133) Purposive sampling adalah adalah “Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai yang memiliki hubungan dengan pemberdayaan kelompok sadar wisata oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang. Untuk lebih jelasnya telah di uraikan dalam table di bawah ini:

Tabel 2. Subjek Penelitian

No	Unsur	Jumlah (Orang)
1	Kepala Bidang Pariwisata	1
2	Staf Bagian Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	1
3	Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Nyalindung	1
4	Ketua Kelompok Sadar Wisata Gunturmekar	1
5	Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Citengah	1
6	Ketua kelompok Sadar Wisata Desa Rancamulya	1
Jumlah		6

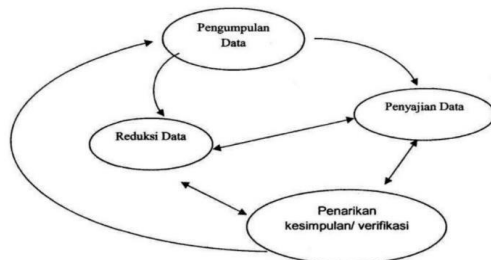
Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017:224-241) sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis beragam literatur baik itu buku-buku ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi lapangan, yaitu Teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, diantaranya melalui Teknik berikut:
 - 1) Observasi
 - 2) Wawancara
 - 3) Dokumentasi
 - 4) Trianggulasi

Sugiyono (Sugiyono, 2019, hal. 365) menjelaskan pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan uji sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas
2. Uji Transferabilitas
3. Uji Depenabilitas
4. Uji Konfirmabilitas

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang dilakukan dengan mengacu pada teknik analisis Data Model Miles and Huberman (Sugiyono, 2019) sebagai berikut



Sumber: Sugiyono, 2019

Gambar 1. Prosedur Pengolahan Data Penelitian

3. RESULTS AND DISCUSSION

Pemberdayaan merupakan proses dalam meningkatkan kemampuan atau potensi seseorang atau kelompok agar lebih mandiri, mampu bersaing, dan mampu mengambil keputusan serta mampu mengelola sumberdaya yang dimiliki. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Eko (2004:11) pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan kelompok sadar wisata sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan pariwisata lokal, melestarikan lingkungan, dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Untuk mengetahui keberhasilan pemberdayaan kelompok sadar wisata, peneliti menggunakan alat ukur sebagai acuan untuk mengukur pemberdayaan menurut Akadun (2005) dikutip dalam (Nugraha, 2022) yang terdiri dari:

1. Daya sosial
2. Daya politik
3. Daya psikologis

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil keseluruhan pemberdayaan kelompok sadar wisata Oleh dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten sumedang sebagai berikut:

Tabel 3. Kesimpulan Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1	Daya Sosial	Kemudahan Mengakses Informasi	Disparbudpora telah menyediakan informasi yang mudah di akses, informasi yang disebarikan melalui platform yang familiar dan mudah diakses yaitu seperti whatsapp, Instagram, serta aplikasi.
		Pengetahuan dan Keterampilan	Dalam Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok sadar wisata dilakukan bermacam metode seperti pendampingan, bimtek, pelatihan, namun pelatihan belum dapat dikatakan optimal karena pelaksanaan hanya satu hingga dua kali dalam satu tahun yang idealnya dilakukan tiga kali dalam satu tahun.
		Sumber Keuangan	Sumber keuangan dalam pemberdaayaan kelompok sadar wisata oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang melakukan kerjasama dengan pihak luar seperti bersumber dari APBN, APBD, CSR, APBDes. Namun belum ada dan khusus yang konsisten disalurkan untuk pemberdayaan pokdarwis.

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
2.	Daya Politik	Partisipasi Pembuatan Kebijakan	Keterlibatan pokdarwis dalam pembuatan kebijakan pariwisata di Kabupaten Sumedang masih terbatas, tidak semua pokdarwis terlibat secara langsung.
		Dukungan Kebijakan	Bentuk dukungan yang diberikan Disparbudpora kepada Pokdarwis mencakup berbagai aspek seperti pengembangan infrastuktur, keamanan, promosi, serta pembinaan dan pelatihan.
3.	Daya Psikologi	Pemenuhan Kebutuhan Material	Bantuan kebutuhan yang diberikan hanya sebatas pembinaan, pelatihan, dan memberikan bantuan sebagai fasilitator dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pariwisata, tidak berupa kebutuhan material.
		Penghargaan	Pemberian penghargaan yang diberikan berupa prioritas mengikuti diklat atau event yang diselenggarakan di luar Kabupaten Sumedang.
		Sanksi	Sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran, peran Dinas lebih difokuskan pada fasilitas, monitoring, dan pemberian dukungan sesuai kebutuhan.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Nyalindung, Ketua Kelompok Sadar Wisata Gunturmekar, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Citengah, Ketua kelompok Sadar Wisata Desa Rancamulya 2025.

Berdasarkan tabel di atas dalam dimensi daya sosial pada pemberdayaan kelompok sadar wisata oleh Dinas Pariwisata kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dikatakan **cukup baik**. Hal tersebut dilihat dari beberapa aspek yang cukup terpenuhi diantaranya indikator kemudahan mengakses informasi, informasi kepariwisataan dapat di akses melalui berbagai macam platform, namun ketersediaan data yang di sajikan masih terbatas dan belum ada kebaruan terkait data-data pariwisata. Selain itu pada indikator pengetahuan dan keterampilan, telah dilakukan berbagaimacam metode seperti pendampingan, bimtek, pelatihan, namun pelatihan belum dapat dikatakan optimal karena pelaksanaan hanya satu dua kali dalam satu tahun yang idealnya dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Selanjutnya dalam indikator sumber keuangan dalam pemberdayaan kelompok sadar wisata oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang melakukan kerjasama dengan pihak luar seperti bersumber dari APBN, APBD, CSR, APBDes. Namun belum ada dana khusus yang konsisten disalurkan untuk pemberdayaan.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Akadun (2025) bahwa Daya Sosial menyangkut akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu suatu rumah tangga, misalnya informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi sosial, dan sumber-sumber keuangan. Bila ekonomi rumah tangga tersebut meningkatkan aksesnya pada dasar-dasar produksi di atas, maka kemampuannya dalam menentukan dan mencapai tujuannya juga meningkat. Peningkatan daya sosial dapat di mengerti sebagai suatu peningkatan akses rumah tangga terhadap dasar-dasar kekayaan produksi mereka.

Sehingga dengan demikian kurangnya kontinuitas, pembaruan, dan intensitas dalam penyediaan akses terhadap informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi, dan sumber keuangan, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi daya sosial kelompok sadar wisata di Sumedang.

Pada dimensi daya politik dalam pemberdayaan kelompok sadar wisata oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang sudah cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan dari beberapa aspek yaitu partisipasi pembuatan kebijakan bahwa adanya keterlibatan pokdarwis dalam pembuatan kebijakan namun tidak semua perwakilan diikuti sertakan karna keterbatasan satu dan lain hal. Selanjutnya di tunjukan oleh indikator dukungan kebijakan yang sudah terpenuhi bahwa bentuk dukungan yang diberikan Disparbudpora kepada Pokdarwis mencakup berbagai aspek seperti pengembangan infrastuktur, keamanan, promosi, serta pembinaan dan pelatihan, namun masih bersifat insidental.

Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat Akadun (2005) bahwa Daya politik meliputi akses setiap anggota keluarga terhadap proses pembuatan terutama keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka sendiri. Daya politik bukan hanya kekuatan untuk memberikan suara, tetapi juga merupakan daya untuk menjadi vokal dan bertindak secara kolektif. Pengaruh politik yang efektif akan tampak tidak hanya pada waktu suara-suara individu meninggi sebagai pengaruh individu terhadap basis lokal maupun personal, melainkan juga pada saat suara tersebut didengungkan Bersama-sama dengan suara asosiasi-asosiasi politik

yang lebih luas, misalnya partai, gerakan sosial, atau kelompok yang berkepentingan seperti kelompok partai atau buruh.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya politik mencakup akses penuh dan berkelanjutan terhadap proses pengambilan keputusan serta kemampuan untuk bertindak kolektif secara vocal dalam memperjuangkan kepentingan bersama, dengan demikian kurangnya pelibatan menyeluruh dan kontinuitas dukungan, menyebabkan daya politik dalam pemberdayaan kelompok sadar wisata belum optimal.

Kemudian pada dimensi daya psikologi dalam pemberdayaan kelompok sadar wisata oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dapat dikatakan sudah **cukup baik**. Hal tersebut di tunjukan oleh aspek yang cukup terpenuhi yaitu pada indikator pemenuhan kebutuhan material dalam Perda nomor 10 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang tahun 2021-2025 adanya pemberian fasilitas kepada pemerintah desa/kelompok masyarakat untuk membangun fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPD, selanjutnya pada indikator pemberian penghargaan menunjukkan pemberian penghargaan yang diberikan berupa prioritas mengikuti diklat atau event yang diselenggarakan di luar Kabupaten Sumedang, dan kemudian pada indikator sanksi menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran, peran Dinas lebih difokuskan pada fasilitas, monitoring, dan pemberian dukungan sesuai kebutuhan.

Pernyataan diatas sejalan dengan pendapat Akadun (2005) bahwa Daya psikologis di gambarkan sebagai rasa potensi individu yang menunjuk perilaku kepercayaan diri. Jika kemampuan ini hadir, ia di tunjukan dalam perilaku percaya diri. Daya psikologis sering kali tampak sebagai suatu keberhasilan dalam domain sosial atau politik. Rasa potensi pribadi yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh positif dan terus menerus terhadap rumah tangga yang secara terus menerus berusaha untuk meningkatkan daya sosial dan daya politiknya secara efektif. Untuk meningkatkan percaya diri diperlukan motivasi berupa pemenuhan kebutuhan material, penghargaan/reward, dan sanksi/punishment.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya dukungan yang mampu memicu rasa percaya diri secara konsisten, seperti reward secara personal, kebutuhan material yang memotivasi, sanksi yang bersifat konstruktif. Dapat dikatakan aspek psikologis masih bersifat struktural belum menyentuh emosional dan motivasional.

4. CONCLUSION

Pariwisata merupakan sektor pembangun ekonomi yang saat ini sedang gencar dibangun dan dikembangkan di setiap negara. Hal ini dikarenakan banyaknya kontribusi pariwisata terhadap pendapatan dalam negeri, seperti penyumbang devisa negara dan penciptaan lapangan kerja. Di Indonesia, pariwisata merupakan salah satu faktor penunjang perekonomian yang cukup besar. Selain itu, sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan perekonomian untuk masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi di Indonesia yang memiliki banyak potensi wilayah yang memiliki daya tarik pariwisata.

Pemberdayaan kelompok sadar wisata oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang telah mencakup daya sosial, daya politik, dan daya psikologis. Namun pelaksanaan pemberdayaan belum berjalan dengan optimal karena keterbatasan anggaran sehingga kegiatan belum dilakukan secara rutin atau berkala. Selain itu data informasi yang diberikan di media sosial masih tergolong minim dan belum adanya keterbaruan informasi, kemudian partisipasi pokdarwis dalam pembuatan kebijakan belum sepenuhnya mewakili. Pemberdayaan ini masih memerlukan penguatan lebih lanjut terutama dalam hal konsistensi, dan efektivitas pelaksanaan program.

REFERENCES

- Akadun. (2005). *Pemberdayaan Birokrasi Pemerintah*. Bandung: CV. Maulana.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Nugraha, D. S. (2022). *Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang*. *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*.
- Rozak, A. (2024, Juni 16). *Pengertian Pemberdayaan, Jenis, Tujuan, dan Contohnya*. Diambil kembali dari DosenPPKN: <https://dosenppkn.com/pemberdayaan/>